

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) STUDI DI DESA TOIDITO
KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO**

Mohammad Safwan Ismail

28.1205

Asal pendaftaran Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Program studi Politik Pemerintahan

Email: Safwanismail2501@gmail.com

ABSTRACT

This final report is titled "**Village Consultative Body Performance In Supervising Pamsimas Program Study In Toidito Village, Pulubala District, Gorontalo District, Gorontalo Province**". PAMSIMAS is a program implemented by the Indonesian Government with the support of the World Bank. By this PAMSIMAS program, hopefully the community will be able to access sustainable drinking water and sanitation services and have a clean and healthy lifestyle.

The method used is descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques used are interview and observation techniques, data analysis techniques are data reduction, data presentation, and organizing conclusions. It was concluded that the performance of the BPD in the Supervision of the Toidito Village PAMSIMAS Program was sufficiently proven by the fact that PAMSIMAS can still be enjoyed until now, because the quality of BPD members and their work is sufficient, the quantity or results of work done have been maximized, but the use of time in work has not been used properly by its members. Cooperation with other parties is also able to run properly even though there are some obstacles.

Keywords: Performance, Supervision, BPD

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Studi di Desa Toidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo". Penelitian ini mengukur kinerja dan juga dilengkapi dengan faktor penghambat dan pendukung serta upaya tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif di dukung oleh data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dan yang terakhir adalah teknik analisis data dengan menggunakan metode Miles dan Huberman. Disimpulkan Kinerja BPD dalam Pengawasan Program PAMSIMAS Desa Toidito sudah cukup dibuktikan dengan masih bisa dinikmatinya PAMSIMAS sampai sekarang, Hambatan yang ditemukan yaitu tidak semua anggota mampu untuk melakukan pengawasan, keterlambatan penyelesaian masalah, terbatasnya koordinasi, sudah mulai rusaknya pipa utama, dan adanya pandemi covid-19. Faktor pendukungnya yaitu masih adanya kesadaran masyarakat serta upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kompetensi, mempedomani jadwal rapat, menyaring aspirasi dan melakukan koordinasi dengan aparat desa.

Kata Kunci : Kinerja, Pengawasan, BPD

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaturan tentang pemerintahan daerah telah silih berganti diterbitkan, banyak mengangkat mengenai persoalan di tingkat kabupaten / kota, namun masih sedikit yang membahas terkait keterlibatan dan peranan desa di dalamnya. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR akhirnya menerbitkan regulasi khusus yang mengatur tentang desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, diharapkan dapat membawa perubahan yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Keterkaitan antara BPD dengan pemerintahan desa adalah sebagai rekan kerja, yaitu dalam menjalankan pemerintahan desa dijalankan oleh pemerintah desa dengan BPD secara bersama-sama. BPD dan pemerintah desa memiliki fungsi yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan desa, salah satunya yaitu BPD bertugas untuk mengawasi kebijakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut.

Maka dengan begitu Badan Permusyawaratan Desa Desa Maitara Utara diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya sebagai institusi lokal dengan efektif dan efisien dalam melakukan pengawasan terhadap program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS).

1.2 Rumusan Masalah

1. Program PAMSIMAS merupakan program yang vital bagi penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat Desa Toidito.
2. Adanya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan program PAMSIMAS.
3. Tidak mempunya Program PAMSIMAS desa Toidito untuk bersaing dengan PAMSIMAS dari desa lain dalam perlombaan.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya banyak masalah yang kemudian di alami oleh BPD itu sendiri dan hal tersebut banyak di alami oleh desa-desa di Indonesia:

Pertama; penelitian Sartika Putri Ngadi dalam jurnal ejournal.unsrat.ac.id yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Di Desa Lopana Kecamatan Amurung Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lopana dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja desa tidak dilaksanakan dengan baik (Sartika Putri Ngadi : 2014).

Kedua penelitian Karlos Mangoto dalam jurnal Politico dengan judul Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. Hasil penelitiannya menunjukkan Pada fungsi pengawasan BPD dalam menjalankan menjalankan pengawasan peraturan Desa dan anggaran pendapatan peneliti menyimpulkan bahwa kurang optimal dan efektifnya pelaksanaan fungsi BPD Desa Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan SITARO. (Karlos Mangoto : 2017)

Ketiga penelitian Suaib Napir dalam jurnal Gorontalo Journal Of Government & Political Studies - Vol 1 Dengan judul Analisis Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karyamukti Kabupaten Gorontalo. Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa BPD belum mampu menganalisis dan mengurai anggaran ranperdes dengan benar. Hal inilah yang membuat BPD masih didominasi oleh kepala desa ketika pembahasan anggaran, sehingga pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa masih lemah. (Suaib Napir : 2018)

Keempat penelitian Abdul Haris dengan judul kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Otonomi Desa. Penelitian ini berkesimpulan dalam hasil penelitian diketahui bahwa BPD telah melaksanakan fungsi dan tugasnya, namun belum optimal, yang disebabkan oleh kurang baiknya pengetahuan anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya, masalah keuangan dari BPD maupun anggotanya, serta kurangnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. (Abdul Haris: 2015)

Kelima penelitian Alamsyah Hamongan Simbolon dan Walid Mustafa Sembiring dengan judul evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penelitian ini berkesimpulan kinerja Badan permusyawaratan desa (BPD) di desa juhar dalam penyelenggaraan desa kurang memuaskan. Bahkan bisa dikatakan pelaksanaannya dalam system pemerintahan desa juhar Badan Permusyawaratan Desa tidak mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah desa dalam menyerap dan menampung aspirasi yang berkembang di desa. (Simbolon dan Mustafa: 2015)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni dalam kinerja BPD dalam melakukan pengawasan terhadap program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Konteks penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendapat dari milner (1990) yang mengatakan bahwa kinerja dapat dilihat dari empat variable yaitu kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dalam bekerja dan kerjasama dengan orang lain dalam bekerja.

1.5 Maksud, Tujuan, dan Manfaat

Maksud

Maksud dari magang ini adalah untuk menggambarkan kinerja BPD dalam melakukan pengawasan terhadap program PAMSIMAS. Untuk menggambarkan faktor penghambat dan pendukung dalam pengawasan program PAMSIMAS yang dijalankan oleh BPD dan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap program PAMSIMAS.

Tujuan

untuk mendiskripsikan :

1. Memperoleh gambaran tentang kinerja BPD dalam melakukan pengawasan terhadap program PAMSIMAS di Desa Toidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.
2. Memperoleh gambaran faktor penghambat dan faktor pendukung kinerja BPD dalam melakukan pengawasan terhadap program PAMSIMAS di Desa Toidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.
3. Memperoleh gambaran upaya yang dilakukan oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap program PAMSIMAS di Desa Toidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Kegunaan

- a. Kegunaan Praktis
 1. Bagi Praja untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman kepada penulis mengenai Kinerja BPD dalam melakukan Pengawasan terhadap Program PAMSIMAS

dan dapat dijadikan pembelajaran untuk melaksanakan tugas dan kewajiban saat turun di lapangan.

2. Bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan referensi bagi lembaga Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam pengembangan ilmu pemerintahan terapan.
 3. Bagi Lokasi dalam hal ini Desa Toidito Kecamatan Pulubala diharapkan dapat menerima saran teoritis dan praktis mengenai Kinerja BPD dalam melakukan Pengawasan terhadap Program PAMSIMAS untuk perbaikan praktik pemerintahan.
- b. Kegunaan Keilmuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua kalangan masyarakat dan memberi sumbangan pengetahuan tentang kinerja BPD dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap program PAMSIMAS Desa Toidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

2.1 Tinjauan Teoritis

Kinerja

Chobib Soleh dan Suprito (2011:3) menjelaskan bahwa pengertian dari kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Sedangkan Pengertian dari kinerja oleh Milner (1990) dalam Sudarmanto (2009:11) adalah “bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melakukan tugas suatu peran dalam organisasi.”

Menurut Sudarmanto (2009:11), “Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja”. Ukuran-ukuran dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran kinerja sangat diperlukan karena akan bermanfaat bagi banyak pihak. Menurut Miner dalam Sudarmanto (2009:11-12) mengungkapkan 4 (empat) dimensi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu :

1. Kualitas, yaitu : tingkat kesalahan, merusakkan, kecermatan
2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan
3. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan waktu kerja efektif/jam kerja hilang.

4. Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja

Kinerja ini diartikan sebagai suatu hasil kerja atau kemampuan kerja organisasi atau seseorang dalam melaksanakan fungsi, tugas maupun tanggungjawab yang telah dibebankan kepadanya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Maka dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya aparatur oleh Muh Ilham dan Welasari (2016:61) adalah, hasil kerja yang terlaksana secara sistematis sesuai ketentuan yang disusun sebagai acuan dari hasil / *outcome*, dan *benefit*, baik secara kualitas maupun secara kuantitas yang secara nyata dihasilkan oleh pegawai, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab yang melekat didalam organisasi.

Badan Permusyawaratan Desa

Keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa ini sebagai jembatan penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa. Selain dari menggali dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Badan Permusyawaratan Desa ini juga berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Desa. Mengingat pentingnya kedudukan suatu peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka di dalam penyusunan peraturan tersebut di dasarkan pada kebutuhan desa setempat. Setelah peraturan desa tersebut di tetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan yang akan di laksanakan oleh Kepala Desa.

Tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa menurut Khasan Effendy (2008:154) yang menyatakan bahwa tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa antara lain, menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, untuk itu lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa serta peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian seorang kepala desa membentuk panitia pemilihan kepala desa, menampung, menggali, merumuskan menyalurkan serta menghimpun aspirasi masyarakat dan juga menyusun tata membentuk panitia membentertib Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyelenggara pemerintah.

Pengawasan

Schemerhorn (2002) dalam Ernie dan Saefullah (2019:263) mendefinisikan “pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”. Handoko (2011:360) berpendapat:

“Pengawasan merupakan suatu pekerjaan yang sistematis dan bertujuan untuk menetapkan standar implementasi sesuai tujuan yang telah direncanakan, merancang sistem informasi yang memiliki umpan balik, mengkomparasi aktivitas secara terbaru berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya, menganalisa serta mengukur ketidaksesuaian dan kemudian mengambil tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perusahaan sumber Kekuasaan dipakai dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut ”.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

PAMSIMAS merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan dari Bank Dunia yang dilaksanakan di pedesaan dan pinggiran kota. Rencana PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas yang disediakan bagi anggota masyarakat yang kurang terlayani, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan daerah pinggiran kota. PAMSIMAS juga diterapkan dengan dukungan dana dari pemerintah pusat, dana pinjaman bank dan kontribusi dana dari provinsi serta kabupaten/kota. Program nasional ini melibatkan beberapa kementerian dalam pembangunannya antara lain Kementerian Kesehatan untuk pembinaan perilaku hidup sehat masyarakat dan Kementerian Pekerjaan Umum yang menjadi pelaksana dari program PAMSIMAS tersebut.

2.2 Tinjauan Legalistik

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

3. Metodologi Penelitian

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif (*descriptive Research*), yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Data, Unit Analisis dan Responden

Unit analisis dalam penelitian ini adalah sekretariat BPD Desa Toidito. Data yang berhasil dihimpun terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara interview dan dari responden. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh RPJM Desa. Dan responden yaitu Ketua BPD desa Toidito, Kepala Desa Toidito, anggota BPD desa Toidito, pengurus PAMSIMAS dan masyarakat desa Toidito.

Variabel Penelitian

Penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji suatu hipotesis ataupun pembuktian korelasi antara variabel akan tetapi menggambarkan dengan apa adanya fenomena yang terjadi yaitu fenomena Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Toidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah salah satu dari teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti yang menggunakan metode tanya jawab untuk bertukar ide , gagasan ataupun informasi yang dilakukan peneliti dan responden

2. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan agar penulis yang akan melaksanakan penelitian mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat. Dengan observasi ini penulis bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang fakta yang sedang terjadi dan sebagai pemecahannya.

Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2013:235) bahwa: observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang orang, karena apa yang dikatakan orang tersebut belum tentu sama dengan apa yang dikerjakannya.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, data-data diperoleh dari banyak sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang juga bermacam-macam, dan hal tersebut dilakukan secara berulang kali sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan tersebut dapat mengakibatkan adanya variasi data yang tinggi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kinerja BPD dilihat dari beberapa indikator

kualitas

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan masyarakat Desa Toidito. Dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Toidito sudah cukup puas dengan hasil dan kualitas dan kecermatan dari pengawasan yang dilakukan oleh BPD dari Desa Toidito karena sering melakukan pengawasan secara rutin dan juga meminta atau mengumpulkan aspirasi dari masyarakat pengguna program PAMSIMAS itu sendiri.

Kualitas suatu pengawasan juga dapat dilihat dari tindak lanjut oleh pemerintah. Namun dalam pelaksanaan suatu pengawasan, masyarakat menilai bahwa pengawasan yang dilakukan belum ada tindak lanjut dari pemerintah mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Namun kurangnya sosialisasi menyebabkan pelaksanaan pengawasan program PAMSIMAS kurang tepat kepada sasaran yang diharapkan.

kuantitas

Pada pengawasan program PAMSIMAS yang diusul oleh masyarakat, BPD telah berkinerja dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tindak lanjut dari keluhan masyarakat yang dilakukan oleh BPD apabila banyaknya keluhan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan harus segera ditangani, maka anggota BPD tersebut akan menyampaikan keluhan tersebut kepada Ketua BPD untuk dimusyawarahkan bersama aparat Desa. BPD menempuh cara ini mengingat kemampuan yang dimilikinya dalam mengaktualisasikan suatu masalah kedalam bentuk konsep dasar pengawasan sangat terbatas.

Penggunaan Waktu Dalam Bekerja

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerja BPD memerlukan ruang kerja sehingga dalam pemanfaatan waktu kerja dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan hal tersebut pun meningkatkan produktifitas kerja.

Pelaksanaan pekerjaan yang baik haruslah memperhatikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi produktivitas kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dapat dilihat dari jam kerja pegawai oleh sebab itu pemanfaatan waktu menjadi begitu penting dalam konsep manajemen kerja yang baik.

Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja

Kerjasama yang ada bukan hanya antara anggota BPD dengan anggota BPD saja, melainkan antara anggota BPD dengan masyarakat. Ketika kerjasama anggota BPD dengan masyarakat baik tentunya pengawasan akan berfungsi dengan baik juga sehingga tidak ada pihak yang merasa rugi terutama bagi masyarakat Toidito. Anggota BPD mempunyai peran penting dalam membantu menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada di desa Toidito.

4.2 Faktor Penghambat Dan Pendukung Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Toidito

a. Penghambat

1. Anggota BPD tidak semua yang mempunyai kemampuan dalam bidang hukum dan proses pengawasan, karena anggota BPD berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang pendidikan yang berbeda.
2. Keterlambatan Penyelesaian Masalah yang Dikeluhkan oleh Masyarakat.
3. Terbatasnya koordinasi masyarakat dengan penyelenggara PAMSIMAS
4. Sudah mulai rusaknya pipa-pipa utama
5. Adanya pandemi Covid-19

b. Pendukung

1. Masih adanya tanggung jawab dari masyarakat pengguna PAMSIMAS.

4.3 Upaya Yang Dilakukan Oleh BPD Dalam Melakukan Pengawasan

Kesimpulan

1. Meningkatkan kompetensi yang dimiliki anggota BPD
2. Mempedomani jadwal agenda rapat

3. Melakukan penyaringan aspirasi masyarakat desa
4. Melakukan koordinasi dengan aparat desa
Upaya perbaikan pipa utama

4.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD pada program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di desa toiditio berjalan dengan cukup lancar hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana program PAMSIMAS masih bisa berjalan dengan lancar sampai dengan sekarang. Temuan penting dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap program PAMSIMAS yaitu rusaknya pipa-pipa utama yang tidak bisa diperbaiki secara langsung oleh pihak BPD maupun aparat desa sehingga pihak BPD dan pihak desa hanya bisa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang menangani secara langsung program PAMSIMAS ini yaitu pihak PUPR.

Yang berikutnya yaitu selama pandemic covid-19 ini selama melaksanakan lockdown pihak BPD dan aparat desa dalam melakukan komunikasi ataupun rapat hanya menggunakan telepon genggam biasa. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar anggota dan BPD dan aparat desa belum terlalu mengerti untuk menggunakan aplikasi zoom meeting ataupun aplikasi meeting lainnya sehingga mereka terpaksa hanya menggunakan telepon genggam biasa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil magang serta analisis yang diperoleh di lapangan yang terkait dengan Kinerja BPD Dalam Pengawasan Program PAMSIMAS di Desa Toidito maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja BPD Toidito dalam Pengawasan Program PAMSIMAS di Desa Toidito sudah berjalan dengan cukup maksimal. Dilihat dari indikator-indikator yang telah dilakukan oleh anggota BPD dimulai dari kualitas, kuantitas, pemanfaatan waktu dalam bekerja sampai dengan kerjasama dengan orang lain dalam bekerja.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi pengawasan pelaksanaan program PAMSIMAS adalah sebagai berikut:
 - 1) Tidak semua anggota BPD mempunyai kemampuan hukum dan proses pengawasan di karenakan perbedaan tingkat pendidikan serta profesi yang dijalankan sebelum menjadi anggota BPD

- 2) Keterlambatan Penyelesaian Masalah yang Dikeluhkan oleh Masyarakat.
 - 3) Terbatasnya koordinasi masyarakat dengan penyelenggara PAMSIMAS
 - 4) Sudah mulai rusaknya pipa-pipa utama.
 - 5) Adanya Pandemi Covid-19
 - 6) Faktor pendukungnya yaitu Masih adanya tanggung jawab dari masyarakat pengguna PAMSIMAS
3. Upaya Yang Dilakukan Oleh BPD Desa Toidito Dalam melakukan Pengawasan Program PAMSIMAS yakni :
- 1) Meningkatkan kompetensi yang dimiliki anggota BPD
 - 2) Mempedomani jadwal agenda persidangan.
 - 3) Melakukan penyaringan aspirasi masyarakat desa
 - 4) Melakukan koordinasi dengan aparat desa
 - 5) Upaya perbaikan pipa utama

6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa Toidito dan Kepala Desa Toidito yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan dan membantu penulis dalam mensukseskan penelitian di Desa Toidito.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andrew E. Sikula. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Erlangga
- Effendy, Khasan. 2008. *Otonomi Desa Histori dan Kontekstual*. Bandung: CV. Indra Prahasta
- Handoko, T Hani. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Muh Ilham, dan Welasari. 2016. *Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Desa*. Bandung: ALQAPRINT JATINANGOR
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Harlow, Edinburgh gate: Pearson
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Jawa Barat: PT. Refika Aditama
- Saefullah, dan Ernie. 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: ALFABETA
- Soleh dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Walliman, Nicholas. 2011. *Research Methods the Basic*. New York: Routledge
- Wasistiono, dan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Wungu, dan Brotoharjo. 2003. *Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda Dengan Merit Sistem*. Jakarta: Raja Grafindo Pusaka.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Akhir Dan Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2019/2020

C. Jurnal-Jurnal

Haris, Abdul. (2015). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Otonomi Desa. Universitas Sumatera Utara

Hartono, Adi. (2016). *Koordinasi antara lembaga dan stakeholder dalam pengembangan taman baca masyarakat*. Jurnal airlangga volume 4

Mangoto, karlos. (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. jurnal Politico

Napir, Suaib. (2018). *Analisis Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Karya Mukti Kabupaten Gorontalo*. Journal Of Government & Political Studies – Vol 1

Ngadi P. Sartika. (2014). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. Ejournal.unsrat.ac.id

Simbolo, dan Mustafa. (2015). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik vol. 3

Sumber Lain

<http://ciptakarya.pu.go.id/v5/berita/detail/Ciptakarya/9098/Pemilihan-BP-SPAMS-Pamsimas-Terbaik-Provinsi-Gorontalo-Tahun-2018>. Diakses pada tanggal 1 September 2020

<http://pamsimas.org/data-aplikasi/pelaporan-sim/#pembrdyn-msyrkt>. Diakses pada tanggal 1 September 2020

https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Pedoman-Umum-Program-Pansimas_1013.pdf Diakses pada tanggal 15 September 2020